

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKABUMI

Arie Melani Purbasari
Email: rie.melan@gmail.com
STISIP Widyapuri Mandiri

Abstract

Digital Population Identity (IKD) is electronic information used to represent Population Documents and return data in digital applications via devices that display Personal Data as the identity in question. The aim of this research is to determine the implementation of the Digital Population Identity (IKD) Policy at the Sukabumi Regency Population and Civil Registration Service. The theory used in this research is: Interests influenced by the existence of the program, type of benefits to be generated, scope of desired change, position of decision maker, program implementer, and resources provided. (Grindle in Anggara (2018:255))

This research uses a qualitative approach with descriptive methods. Data were collected through participatory and active observation, semi-structured interviews and documentation using notebooks, cameras and recordings. Validate the information data that has been collected by testing credibility through triangulation (technique, source and time) and analysis using reduction techniques, presenting data and drawing conclusions. Setting Informants used purposive sampling and snowball sampling methods, there were 5 informants in this study, namely: 1 Service Secretary, 1 Head of Division, 1 Service, 2 Community.

The results of this research, seen from the aspect of interests influenced by the program, are appropriate, seen from the aspect of the types of benefits that will be produced are quite appropriate, seen from the aspect that the range of changes desired is quite optimal. seen from the aspect that the position of the decision maker is not adequate, seen from the aspect that the program implementer is not optimal, and seen from the aspect that the resources provided are quite adequate.

Keywords: Implementation, Policy, Digital Population Identity (IKD)

Abstrak

Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program, Jenis manfaat yang akan

dihasilkan, Jangkauan perubahan yang diinginkan, Kedudukan pengambil Keputusan, Pelaksana program, dan Sumber daya yang disediakan. (Grindle dalam Anggara (2018:255))

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi partisipatif dan aktif, wawancara semi struktur dan dokumentasi dengan alat buku catatan, kamera, dan rekaman. Validasi data informasi yang sudah terkumpul dengan uji kredibilitas melalui Triangulasi (teknik, sumber dan waktu) dan analisis dengan teknik reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Setting Informan menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling, adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yaitu: 1 Sekretaris Dinas, 1 Kepala Bidang, 1 Pelayanan, 2 Masyarakat.

Hasil penelitian ini dilihat dari aspek kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program sudah tepat, dilihat dari aspek jenis manfaat yang akan dihasilkan cukup sesuai, dilihat dari aspek jangkauan perubahan yang diinginkan cukup optimal. dilihat dari aspek kedudukan pengambil keputusan belum memadai, dilihat dari aspek pelaksana program kurang maksimal, dan dilihat dari aspek sumber daya yang disediakan cukup memadai.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Submitted: 19-02-2025 | Accepted: 21-02-2025 | Published: 28-02-2025

1. Pendahuluan

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan identitas berbasis digital yang dirancang akan menggantikan Kartu Tanda Penduduk KTP-el. Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki fungsi untuk membuktikan identitas, autentikasi dan otorisasi Identitas. Pelaksanaan program kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilakukan Disdukcapil Kabupaten Sukabumi antara lain Melakukan pembentukan tim teknis atau persiapan, Sosialisasi, Pelayanan, Pendampingan, Monitoring dan evaluasi.

Berdasarkan hasil survei , pelaksanaan kebijakan tersebut masih terdapat masalah yang mengakibatkan program dari kebijakan tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan serta belum tepat sasaran, peneliti menduga masalah tersebut disebabkan oleh Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) belum dilakukan sepenuhnya dengan baik karena ada beberapa faktor masalah yaitu : kurangnya sosialisasi terkait aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang harus ke kantor Disdukcapil, sehingga

masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari kantor Disdukcapil sedikit terhambat karena faktor jarak. Ketiga, kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya sebuah administrasi kependudukan.

Peneliti menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Tujuan dari penelitian adalah untuk mempelajari dan mengetahui Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi ditinjau dari adanya program, jenis manfaat, jangkauan yang diinginkan, kedudukan dalam mengambil keputusan, bagaimana melaksanakan program tersebut, dan terkait sumber.

2. Kajian Pustaka

Implementasi

Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Anggara (2018:232) mengatakan bahwa: "Implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan".

Kebijakan

Menurut Anderson dalam Winarno (2014:21), Kebijakan itu merupakan arahan atau tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor untuk mengatasi suatu masalah ataupun suatu persoalan.

Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan informasi dalam bentuk elektronik yang dipergunakan untuk menyajikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui ponsel atau laptop yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Target dari Program IKD ini adalah Aparatur Sipil Negara ataupun Non Aparatur Sipil Negara Disdukcapil, ASN / Non ASN Pemda Kota / Pemda Kabupaten, mahasiswa serta masyarakat umum yang sudah memiliki KTP elektronik.

3. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Indikator penelitian berikut digunakan dalam penelitian ini, sebagaimana ditunjukkan oleh penekanan masalah dan pertanyaan penelitian utama yaitu kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program (Peran stakeholder dan pemangku kepentingan), jenis manfaat yang akan dihasilkan (Manfaat yang diterima dan dampak pada masyarakat), jangkauan perubahan yang diinginkan, kedudukan pengambil keputusan (Pelaksana kebijakan), pelaksana program (Peran pemerintah, Peran masyarakat), sumber daya yang disediakan (Sumber daya manusia, Sumber daya biaya, Sumber daya waktu).

Unit yang akan dianalisis adalah Pemerintah Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi dan Masyarakat Kabupaten Sukabumi. Informan pada penelitian ini terdiri dari lima orang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi satu orang, Kepala Bidang satu orang, Petugas Pelayanan satu orang dan Masyarakat Kabupaten Sukabumi dua orang. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi.

4. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Hasil Penelitian Terhadap Aspek Kepentingan yang Dipengaruhi oleh Adanya Program sangat baik

Hasil Penelitian Terhadap Aspek Kepentingan yang Dipengaruhi oleh Adanya Program sangat baik, kolaborasi antara berbagai stakeholder dan pemangku kepentingan sangat baik untuk kesuksesan implementasi IKD.

Hasil Penelitian Terhadap Aspek Jenis Manfaat yang Akan Dihasilkan

- Manfaat Yang Akan Diterima : Pemanfaatan IKD di Kabupaten Sukabumi bertujuan untuk menciptakan sistem kependudukan yang lebih efisien, aman, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan publik di kabupaten sukabumi”
- Dampak Pada Masyarakat : Secara keseluruhan, kebijakan IKD di Kabupaten Sukabumi berdampak sangat baik dan bermanfaat bagi warga, khususnya untuk

memudahkan akses, efisiensi, dan keamanan. Namun, untuk mengoptimalkan dampaknya, perlu ada upaya yang signifikan dalam hal sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan sistem ini dengan baik

Hasil Penelitian Terhadap Jangkauan perubahan yang diinginkan

- Tujuan Yang Dinginkan : dapat membawa perubahan positif dalam pelayanan kependudukan di Kabupaten Sukabumi, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Agar IKD terlaksana dengan baik, maka pihak pelaksana melakukan beberapa langkah supaya kebijakan ini dapat terlaksana yaitu dengan melakukan sosialisasi & edukasi, kerja sama antar Lembaga, dan yang terakhir itu evaluasi.

Hasil Penelitian Terhadap Kedudukan Pengambil Keputusan

- Pelaksana Kebijakan : Disdukcapil lebih ke konsultasi dengan stakeholder seperti pemda, lembaga non-pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Cara ini bertujuan untuk mendapatkan masukan, dukungan, dan memahami kebutuhan serta harapan dari berbagai pihak.

Hasil Penelitian Terhadap Aspek Pelaksanaan Program

- Peran Pemerintah : Sejauh ini pemerintah melaksanakan peran penting dalam kebijakan IKD dengan menetapkan regulasi, menyediakan teknologi, mendanai program, memberikan pelatihan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi. Meskipun sudah ada kemajuan, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti masalah infrastruktur di daerah terpencil, literasi digital masyarakat, dan kendala teknis. Disdukcapil Kabupaten Sukabumi terus berupaya meningkatkan layanan dan memperbaiki sistem untuk mengatasi tantangan tersebut.
- Peran masyarakat : sangat penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan IKD. Partisipasi aktif, peningkatan literasi digital, penggunaan yang efektif, kolaborasi dengan pihak berwenang, dan sosialisasi adalah beberapa cara di mana masyarakat dapat berkontribusi. Pemerintah daerah melalui Disdukcapil juga harus terus menyediakan dukungan, edukasi, dan fasilitas yang memadai untuk mendukung peran masyarakat ini. Sejauh ini sudah berjalan dengan baik

namun ada beberapa kendala seperti banyaknya orang tua yang tidak mengerti terkait IKD ini dan juga ada beberapa wilayah dengan akses internet buruk. Tugas Masyarakat yang paling utama adalah ikut partisipasi aktif dalam mensukseskan kebijakan ini, contohnya seperti ikut aktivasi aplikasi IKD.

Hasil Penelitian Terhadap Aspek Sumber Daya

- Beberapa dari pegawai sudah memiliki kualifikasi terutama di bidang IT, sudah dilatih terkait aktivasi IKD. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi sudah memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia yang ada untuk menunjang kebijakan Identitas Kependudukan Digital, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efisien dan efektif.
- Sumber Daya Biaya : Penganggaran biaya untuk program seperti IKD sangat tergantung pada skala program, infrastruktur yang ada, dan kebutuhan spesifik setiap daerah. Biasanya, konsultasi dengan ahli di bidang teknologi informasi dan keuangan dalam menyusun penganggaran yang akurat dan efektif. Setiap daerah memiliki estimasi biaya yang berbeda tergantung pada skala program, infrastruktur yang sudah ada, dan kompleksitas teknologi yang digunakan. Untuk pelaksanaan Kebijakan IKD di Kabupaten Sukabumi terkait dengan anggaran yang digunakan hanya seputar biaya internet saja karena IKD ini aplikasi secara otomatis yang memerlukan internet menjalankan aplikasi tersebut.
- Sumber Daya Waktu : Untuk manajemen waktunya Disdukcapil menjadwalkan kegiatan sosialisasi dan pelayanan IKD ini ke berbagai instansi baik pemerintah, swasta, maupun pendidikan dengan izin terlebih dahulu. Untuk target sasaran dan lokasi yang didatangi untuk pelaksanaan IKD ini seperti Mahasiswa, Pelajar SMA/SMK, Pegawai Swasta atau Buruh Pabrik. Waktu yang sudah dijadwalkan jadi sudah berjalan sesuai prosedur

Pembahasan

Analisis Terhadap Kepentingan Yang Dipengaruhi oleh Adanya Program IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi

- Kepentingan Yang Dipengaruhi oleh Adanya Program dalam Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi sudah tepat. Hal ini dapat diketahui dari ungkapan para informan mengatakan bahwa dari peran stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan IKD sangat signifikan. Kolaborasi antara Disdukcapil, pemerintah daerah dan pusat, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan media
- Kepentingan yang dipengaruhi pemangku kepentingan implementasi kebijakan IKD di Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemangku kepentingan sangat penting untuk keberhasilan program ini. Pendekatan bertahap dalam pelaksanaan kebijakan mencerminkan kesadaran akan kompleksitas dan kebutuhan untuk membangun dukungan di berbagai lapisan masyarakat. Meskipun ada tantangan, para informan menunjukkan optimisme terhadap efektivitas dan manfaat dari kebijakan ini, dengan penekanan pada perlunya evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Analisis Terhadap Jenis Manfaat Yang Akan Dihasilkan

- Jenis Manfaat Yang Akan Dihasilkan dalam Implementasi Kebijakan IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi cukup sesuai, hal ini dapat diketahui dari manfaat yang akan diterima secara keseluruhan, implementasi IKD ini menawarkan berbagai manfaat signifikan, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Dengan mengedepankan kemudahan akses, keamanan data, efisiensi biaya, dan transparansi, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan sistem administrasi kependudukan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Dampak terhadap masyarakat terkait dengan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sukabumi menunjukkan potensi dampak positif yang signifikan, terutama dalam hal kemudahan akses, efisiensi, dan keamanan. Namun, untuk memaksimalkan dampak positif ini, diperlukan upaya yang signifikan dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Analisis Terhadap Jangkauan Perubahan yang Diinginkan dalam Implementasi Kebijakan IKD

- Jangkauan Perubahan yang diinginkan sudah cukup optimal, hal ini dapat diketahui dari ungkapan informan pemerintah dan masyarakat terkait dengan tujuan yang diinginkan dari kebijakan IKD di Kabupaten Sukabumi mencakup peningkatan pelayanan, aksesibilitas informasi, serta pemanfaatan teknologi untuk mencapai efisiensi dalam administrasi kependudukan. Melalui berbagai pendapat yang diperoleh, jelas terlihat bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada langkah-langkah konkret yang diambil, mulai dari sosialisasi, kerjasama dengan berbagai pihak, hingga pelaksanaan yang efektif di lapangan. Oleh karena itu, dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Analisis Terhadap Kedudukan Pengambilan Keputusan dalam Implementasi Kebijakan IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi

- Kedudukan pengambilan keputusan dalam Implementasi Kebijakan IKD belum memadai, hal ini dapat diketahui dari ungkapan para informan tentang pelaksana kebijakan IKD di Kabupaten Sukabumi menunjukkan pendekatan yang inklusif dan bertahap dalam implementasinya. Konsultasi dengan pemangku kepentingan, rencana yang matang, serta tahapan pelaksanaan yang sistematis merupakan kunci untuk keberhasilan program ini. Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan, yang memerlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan edukasi. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait.

Analisis Terhadap Pelaksanaan Program

- Pelaksanaan Program dalam Implementasi Kebijakan IKD kurang maksimal, hal ini dapat diketahui dari ungkapan pemerintah dan Masyarakat mengenai peran pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan IKD sangatlah krusial, mulai dari pembuatan regulasi hingga pelaksanaan dan evaluasi. Kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta upaya yang berkelanjutan dalam sosialisasi dan penyelesaian tantangan, menjadi kunci utama untuk mencapai keberhasilan kebijakan ini. Meskipun terdapat tantangan, usaha pemerintah

untuk meningkatkan layanan dan sistem menunjukkan komitmen mereka dalam implementasi kebijakan yang lebih baik di masa depan.

- Peran Masyarakat dalam kebijakan IKD sangatlah penting. Masyarakat harus aktif terlibat, meningkatkan literasi digital, dan berkontribusi dalam sosialisasi. Namun, tantangan seperti keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan orang tua dan masih sedikitnya pengguna IKD harus menjadi fokus perhatian pemerintah dan pihak berwenang untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan ini. Dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah melalui edukasi dan fasilitas yang memadai akan sangat menentukan keberhasilan kebijakan IKD di masa depan.

Analisis Terhadap Sumber daya yang disediakan

- Sumber daya yang disediakan dalam Implementasi IKD cukup memadai, hal ini dapat diketahui dari ungkapan para informan mengenai sumber daya manusia sudah dalam kondisi yang baik untuk mendukung kebijakan IKD. Dengan kualifikasi yang memadai dan pelatihan yang telah dilakukan, pegawai siap melaksanakan tugas - tugas terkait. Namun, tantangan tetap ada dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan SDM agar setiap pegawai dapat berkontribusi secara maksimal. Peningkatan pengelolaan dan evaluasi kinerja SDM juga perlu terus dilakukan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan ini. Akan tetapi dari sumber daya biaya yaitu pentingnya penganggaran yang tepat dan memadai dalam pelaksanaan kebijakan IKD. Tantangan yang dihadapi, seperti kekurangan fasilitas dan keterbatasan anggaran, harus diatasi melalui perencanaan yang lebih matang dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait. Untuk mencapai keberhasilan program, pengalokasian sumber daya biaya yang efisien dan efektif menjadi sangat krusial.
- Sumber daya waktu dalam pelaksanaan kebijakan IKD di Kabupaten Sukabumi sangat bergantung pada perencanaan, koordinasi antar instansi, dan komunikasi yang jelas dengan masyarakat. Meskipun ada tantangan dalam hal pemahaman masyarakat, pengaturan waktu yang terstruktur dan terencana dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan perlu dilakukan

untuk memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang optimal.

5. Kesimpulan

Atas Dasar hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi dilihat dari aspek kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program sudah tepat. Para informan menekankan bahwa peran stakeholder sangat signifikan dalam pelaksanaan kebijakan ini. Kolaborasi antara Disdukcapil, pemerintah daerah dan pusat, masyarakat, sektor swasta, akademisi, dan media menjadi kunci utama untuk memastikan kebijakan IKD berjalan efektif, efisien, dan aman. Setiap stakeholder memiliki peran yang saling melengkapi, mulai dari perumusan kebijakan hingga pengawasan pelaksanaan, yang memastikan kebijakan ini memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Dilihat dari aspek jenis manfaat yang akan dihasilkan cukup sesuai karena Kebijakan IKD di Kabupaten Sukabumi dapat memberikan berbagai manfaat seperti kemudahan akses layanan publik, peningkatan keamanan data, dan efisiensi biaya. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk memodernisasi sistem administrasi kependudukan, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Untuk mengoptimalkan dampak positif dari kebijakan IKD, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat. Dilihat dari aspek jangkauan perubahan yang diinginkan cukup optimal, karena tujuan utama dari kebijakan IKD di Kabupaten Sukabumi adalah untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas data kependudukan melalui pemanfaatan teknologi, serta memberikan pelayanan yang lebih baik dan mudah diakses oleh masyarakat. Dilihat dari aspek kedudukan pengambilan keputusan belum memadai, masih ada kesalahpahaman ini menunjukkan bahwa komunikasi antara pelaksana kebijakan dan masyarakat belum efektif. Upaya yang lebih terstruktur dan jelas dalam menjelaskan kebijakan IKD kepada masyarakat diperlukan agar implementasi kebijakan ini dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan harapan. Dilihat dari aspek pelaksana program kurang maksimal. Upaya berkelanjutan dalam sosialisasi dan penyelesaian tantangan menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Meskipun ada tantangan yang dihadapi,

komitmen pemerintah untuk meningkatkan layanan dan sistem menunjukkan harapan yang lebih baik di masa mendatang. Dilihat dari aspek sumberdaya yang disediakan cukup memadai. Sumber daya manusia sudah memiliki kualifikasi dan pelatihan yang memadai.

Saran

Disdukcapil adakan forum rutin antara semua stakeholder untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait pelaksanaan IKD, melakukan kampanye informasi melalui berbagai media, Libatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan IKD untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi mereka terakomodasi, tetap fleksibel dalam mengadaptasi kebijakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, menyusun panduan yang jelas dan rinci tentang kebijakan IKD, termasuk langkah-langkah teknis yang diperlukan. Materi informasi ini bisa berupa brosur, poster, video tutorial, dan infografis yang mudah dipahami oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pemerintah menyediakan akses internet dan perangkat teknologi yang memadai di wilayah yang masih kekurangan infrastruktur, termasuk di daerah pedesaan, menyediakan pelatihan langsung mengenai cara menggunakan aplikasi IKD, baik secara individu maupun kelompok, untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses dan menggunakan IKD dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi Ke-2). Alfabeta.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*, Bandung : CV. Pustaka setia.
- Alamsyah, K. (2016). *Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi : Media Citra Mandiri Press*
- Meutia, I. F. (2017). *Analisis kebijakan publik*.
- Moleong. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan evaluasi kebijakan publik*. Unisri Press.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sutikno, M. S., & Hadisaputra, P. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistica.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*.
- Hasan, M., Harahap, T. K., Hasibuan, S., Rodliyah, I., Thalhah, S. Z., Rakhman, C. U., ... & Arisah, N. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. Penerbit Tahta Media.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi kebijakan publik : konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gave Media.
- Ratnaningtyas, E. M., Saputra, E., Suliwati, D., Nugroho, B. T. A., Aminy, M. H., Saputra, N., & Jahja, A. S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. no. Januari. Aceh : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Subakti, H., Hurit, U. R., Eni, D. G. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Media Sains Indonesia